

Siaran Pers

POSISI VITAL INFORMASI GEOSPASIAL BAGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA

JAKARTA (23/8) – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan pejabat Kementerian PPN/Bappenas bertemu dengan pejabat Badan Informasi Geospasial (BIG) di kantor pusat BIG yang terletak di Cibinong, Jawa Barat. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Bambang mengharapkan agar BIG berperan penuh atas kebijakan Presiden RI Joko Widodo mewujudkan Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy* yang ditargetkan rampung pada 2019. Peran BIG yang menyediakan informasi geospasial disebut vital bagi perencanaan pembangunan Indonesia karena juga menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. “Tanggung jawab yang diemban Badan Informasi Geospasial sebagai pelaku utama *One Map Policy* sangat penting mengingat nantinya hanya akan ada satu peta acuan,” tutur Menteri Bambang.

Dengan demikian, pemerintah bisa menghemat anggaran mengingat alokasi dana untuk pembuatan peta bisa disatukan pada BIG. Sesuai amanat Presiden Jokowi, salah satu bidang penting yang terdampak atas informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta adalah pertanian, dengan fokus utama pada produksi padi. Pasalnya, penambahan luas cetak sawah selama ini hanya berdasarkan pada konversi jumlah rupiah untuk prakiraan berapa hektar yang akan dibangun. Untuk itu, Menteri Bambang menyebut Kementerian PPN/Bappenas akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BIG untuk kemungkinan kegiatan verifikasi terkait pencetakan sawah baru tersebut. “BIG bisa memverifikasi akurasi data yang digunakan untuk membuka lahan pertanian baru,” tutur beliau.

Selain untuk produksi padi, Kebijakan Satu Peta juga akan diandalkan untuk identifikasi titik-titik kebakaran hutan, dan akan bermanfaat sebagai acuan perencanaan kegiatan/program kementerian/lembaga. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga meninjau *Geospatial Support Command Centre* (GSCC) BIG yang menjadi rumah bagi Ina-Geoportal dan pengolahan data informasi geospasial dasar. Kepala BIG Priyadi Kardono mengapresiasi kunjungan Menteri Bambang dan menyatakan kesigapan untuk membuat data informasi geospasial yang akurat. “Selain Kebijakan Satu Peta, kami merancang atlas perencanaan pembangunan yang bisa menjadi instrumen informasi geospasial untuk membangun Indonesia,” ungkapnya.

Badan Informasi Geospasial yang dahulu bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, Kementerian PPN/Bappenas kini diberi mandat sebagai koordinator BIG. Penunjukan tersebut dalam rangka optimalisasi penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan Indonesia. ■

Jakarta, 23 Agustus 2016

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31936207, 3905650; Faksimile (021) 3145374